

KONSEP PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI NAGARI MUARO KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT

THE CONCEPT OF SLUM HOUSING AND SETTLEMENT ENVIRONMENT MANAGEMENT IN NAGARI MURO, SIJUNJUNG DISTRICT WEST SUMATERA

Elviyanti

Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Ekasakti

E-mail: elviyant.stmt@gmail.com

INFO ARTIKEL

Koresponden

Elviyanti

Elviyanti.stmt@gmail.com

Kata kunci:

penanganan,
lingkungan,
permukiman kumuh

hal: 175 - 189

ABSTRAK

Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Bupati Sijunjung No. 188.45/521/KPTS-BPT-2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan luas 116,25 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki luas 313.080 Ha. Perbandingan antara lokasi lingkungan perumahan kumuh dengan luas administrasi kabupaten Sijunjung ternyata 37%. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh akan menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Deleniasi yang diteliti adalah kawasan nagari Muaro kecamatan Sijunjung dengan luas 25,73 Ha. Nagari muaro merupakan ibukota kabupaten Sijunjung. Metoda yang digunakan adalah Metoda Deskriptif Analisis dengan pendekatan Tridaya yaitu normatif, partisipatif dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan solusi kepada Pemerintah dan stake holder agar berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian ini adalah menentukan Prioritas Penanganan dan konsep Penanganan terhadap lingkungan permukiman kumuh yang menjadi Prioritas pertama.

Copyright © 2018 U JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Correspondent:

Elviyanti

Elviyanti.stmt@gmail.com

keywords:

*handling,
environment,
slum housing and
settlements*

page: 175-189

ABSTRACT

Sijunjung Regency is part of West Sumatra Province. Based on the Decree of the Regent of Sijunjung No. 188.45 / 521 / KPTS-BPT-2014, dated October 13, 2014 concerning the Determination of Slum Housing and Settlement Locations with an area of 116.25 Ha. Administratively, the Sijunjung Regency area has an area of 313,080 Ha. The comparison between the location of the slum housing area and the administrative area of Sijunjung district turned out to be 37%. Widespread housing and slum settlements will have an impact on increasing the frequency of fire and flood disasters, increasing potential vulnerability and social conflict, decreasing the level of public health, decreasing the quality of housing infrastructure and facilities, and so on. The delegation studied was the Muaro nagari area in Sijunjung sub-district with an area of 25.73 ha. Nagari Muaro is the capital of Sijunjung district. The method used is descriptive method analysis with Tridaya approach, namely normative, participatory and technical. This study aims to provide contributions and solutions to the Government and stake holders in order to reduce the area of housing and slums in Sijunjung district. The results of this study are to determine the Priority of Handling and the concept of Handling Planning on slum environments.

Copyright © 2018 U JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk perkotaan saat ini lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Penduduk perkotaan tersebut umumnya berasal dari urbanisasi dan tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 sebesar 54.000 hektar, telah berkembang menjadi 59.000 hektar tahun 2009. Diperkirakan apabila tidak dilakukan penanganan, luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 hektar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun.

Mengacu pada Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya pencegahan terjadinya daerah kumuh pada hakekatnya bermuara kepada upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupan sosial ekonominya lebih baik dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk menjaga lingkungannya setelah kondisi sosial ekonominya menjadi baik maka secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya.

Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Bupati Sijunjung No. 188.45/521/KPTS-BPT-2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan luas 116,25 hektar (Tabel 1). Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki luas 313.080 hektar, meliputi 8 kecamatan, 60 nagari dan 1 desa dengan 263

orong. Perbandingan antara lokasi lingkungan perumahan kumuh dengan luas administrasi Kabupaten Sijunjung adalah 37%, sehingga sangat dibutuhkan penanganan serius agar lingkungan kumuh menjadi *zero persent* sesuai dengan Program Pemerintah Indonesia.

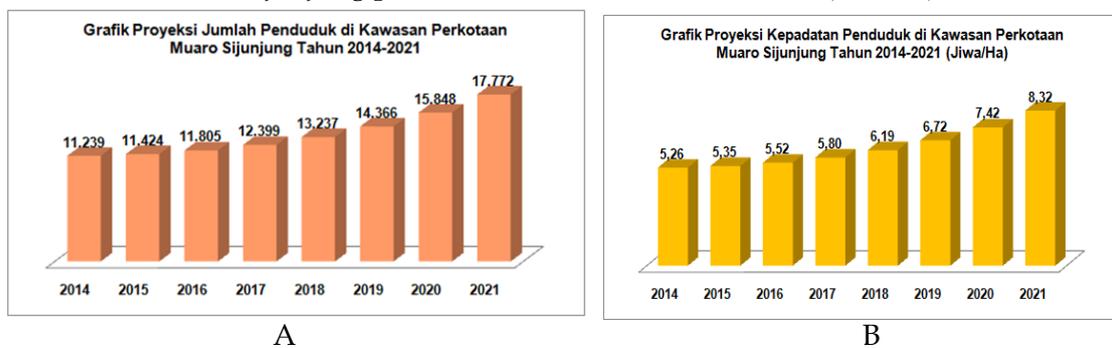
Tabel 1. Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung

| No | Lokasi (Desa, Jorong, Kawasan) | Kecamatan | Luas | |
|---------------|--|-------------|---------------|---------------|
| | | | (Ha) | % |
| 1 | Sungai Tambang Nagari Kunangan Parik Rantang | Kamang Baru | 26,75 | 23,01 |
| 2 | Kawasan Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto | Koto VII | 20,13 | 17,32 |
| 3 | Pasar Padang Sibusuk Nagari Padang Sibusuk | Kupitan | 24,34 | 20,94 |
| 4 | Kawasan Pasar Sijunjung | Sijunjung | 19,3 | 16,60 |
| 5 | Kawasan Muaro | Sijunjung | 25,73 | 22,13 |
| Jumlah | | | 116,25 | 100,00 |

Sumber: Lampiran SK Bupati Sijunjung No. 188.45/521/KPTS-BPT-2014

Prosentase laju pertumbuhan penduduk adalah perkiraan laju pertambahan penduduk yang terjadi setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertambahan penduduk alami dan migrasi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sijunjung, laju pertumbuhan penduduk di kecamatan ini sebesar 1,65% per tahun.

Dengan menggunakan data jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung dari tahun 2014 sebesar 11.239 jiwa sampai dengan tahun 2017 sebesar 12.399 jiwa dan akan di proyeksikan sampai tahun 2021. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung pada tahun 2021 sebesar 17.772 jiwa, seperti pada Gambar 1. Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung pada tahun 2021 sebesar 8 jiwa/hektar (Gambar 2). Hasil proyeksi jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung pada tahun 2021 sebesar 4.714 KK (Tabel 2).



Gambar 1. A=Proyeksi Jumlah Penduduk, B=Proyeksi Kepadatan Penduduk

Tabel 2. Proyeksi Jumlah KK Dirinci Menurut Jorong di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung Tahun 2014-2021

| No. | Jorong | Jumlah KK | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pulau Berambai | 173 | 176 | 182 | 191 | 204 | 221 | 244 | 274 |
| 2 | Subarang Ombak | 465 | 473 | 488 | 513 | 548 | 594 | 656 | 735 |
| 3 | Tengah | 337 | 343 | 354 | 372 | 397 | 431 | 475 | 533 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 271 | 275 | 285 | 299 | 319 | 346 | 382 | 429 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 152 | 155 | 160 | 168 | 179 | 194 | 214 | 240 |
| 6 | Subarang Sukam | 141 | 143 | 148 | 156 | 166 | 180 | 199 | 223 |
| 7 | Pematang Anjuang | 173 | 176 | 182 | 191 | 204 | 221 | 244 | 274 |
| 8 | Muaro Gambok | 619 | 629 | 650 | 683 | 729 | 791 | 873 | 979 |
| 9 | Pematang Saribulan | 389 | 395 | 409 | 429 | 458 | 497 | 549 | 615 |
| 10 | Batang Salosah | 261 | 265 | 274 | 288 | 307 | 334 | 368 | 413 |
| Jumlah | | 2.981 | 3.030 | 3.131 | 3.289 | 3.511 | 3.810 | 4.204 | 4.714 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Mengacu pada kebutuhan lahan minimum untuk 1 unit rumah sebesar 100 m², maka kebutuhan lahan untuk memenuhi *backlog* 504 unit rumah adalah 5,04 hektar. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung mengalami peningkatan menjadi 17.771 jiwa, maka kebutuhan rumah juga bertambah menjadi 659 unit rumah dan kebutuhan lahan juga akan bertambah menjadi 6,59 hektar.

Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan Penambahan Rumah di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung Tahun 2014-2021

| x | Jorong | Kebutuhan Penambahan Rumah (unit) | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pulau Berambai | 6 | 9 | 13 | 17 | 23 | 30 | 38 |
| 2 | Subarang Ombak | 16 | 25 | 35 | 47 | 61 | 80 | 103 |
| 3 | Tengah | 11 | 18 | 25 | 34 | 44 | 58 | 75 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 9 | 14 | 20 | 27 | 36 | 46 | 60 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 34 |
| 6 | Subarang Sukam | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 24 | 31 |
| 7 | Pematang Anjuang | 6 | 9 | 13 | 17 | 23 | 30 | 38 |
| 8 | Muaro Gambok | 21 | 33 | 46 | 62 | 82 | 106 | 137 |
| 9 | Pematang Saribulan | 13 | 21 | 29 | 39 | 51 | 67 | 86 |
| 10 | Batang Salosah | 9 | 14 | 19 | 26 | 34 | 45 | 58 |
| | Jumlah | 101 | 158 | 222 | 299 | 393 | 510 | 659 |

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan Tridaya yaitu terdiri atas 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Normatif. Pendekatan normatif artinya pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi penanganan kawasan permukiman kumuh, dokumen perencanaan pembangunan (*development plan*) sektoral, dan dokumen perencanaan penataan ruang (*spatial plan*) di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung.
- 2) Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif. Pendekatan partisipatif artinya pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan usulan terkait Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat mengakomodir seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah, dan fasilitatif. Artinya pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat tentang Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- 3) Pendekatan Teknis. Pendekatan teknis artinya proses penyusunan rencana Penanganan lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, mulai dari tahap pengumpulan data, analisa data, perumusan konsep pengelolaan dan indikasi program pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.

Penggunaan ketiga pendekatan secara bersama diharapkan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung, dapat

menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan normatif, partisipatif, fasilitatif dan akademik. Diagram pendekatan studi seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Pendekatan Studi

Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung akan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pendampingan Masyarakat;
3. Tahap Penyusunan Dokumen PLP2K

Secara lengkap, rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, terdiri dari:

- 1) Pembentukan anggota tim pelaksana, yang terdiri dari Ketua dan Anggota
- 2) Penyusunan metodologi, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penanggung jawab masing-masing kegiatan;
- 3) Identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
- 4) Melaksanakan kajian awal (*desk study*) dari berbagai literatur tentang pelaksanaan kegiatan PLP2K
- 5) Mempersiapkan bahan untuk kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan PLP2K

2. Tahap Pendampingan Masyarakat

Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, terdiri dari:

- 1) Sosialisasi kegiatan PLP2K di nagari Muaro;
- 2) Mengumpulkan data instansi kabupaten untuk mendukung pelaksanaan survey maupun kegiatan-kegiatan lanjutannya;
- 3) Rembug Warga I, rincian kegiatan rembug warga I meliputi:
 - a. Sosialisasi tingkat nagari;
 - b. Pembentukan TPM;
 - c. Pembentukan Tim SKS;
 - d. Penggalan potensi dan masalah;
 - e. Penjaringan usulan program dan analisa.
- 4) Pelaksanaan Survei Kampung Sendiri berupa pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang hasilnya pengidentifikasian permasalahan :
 - a. Identifikasi batasan luas dan besaran unit lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani disesuaikan untuk menghasilkan peta dasar yang menjadi landasan perencanaan, Delineasi kawasan Perencanaan.

- b. Identifikasi kondisi perumahan dan permukiman dikawasan penanganan.
 - c. Identifikasi kondisi Prasarana umum dasar, kondisi jalan lingkungan, kondisi air bersih, kondisi drainase, kondisi air limbah, kondisi persampahan, kondisi sistem proteksi kebakaran.
 - d. Identifikasi kondisi aktifitas ekonomi dan kondisi sosial budaya dikawasan penanganan
 - e. Identifikasi jenis stimulan fisik dan non-fisik yang dapat dibangun atau dilaksanakan bagi pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan.
- 5) Analisa data hasil survei, berdasarkan hasil identifikasi dan kajian terhadap data sekunder. Analisis yang dilakukan terutama mencakup:
- a. Analisis kependudukan dikawasan penanganan dan peran lokasi dalam sistem tata ruang kota/kabupaten (analisis terhadap struktur tata ruang);
 - b. Analisis kebutuhan penanganan fisik dikawasan PLP2K
 - c. Analisis Prioritas penanganan kawasan kumuh.
 - d. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi bangunan gedung
 - e. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi jalan lingkungan
 - f. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi limbah
 - g. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi persampahan
 - h. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi proteksi kebakaran
- 6) Rembug Warga II, kegiatan yang dilakukan dalam rembug warga II adalah penyusunan dan penyepakatan matrik program.
- 7) Rembug Warga III, kegiatan yang dilakukan dalam rembug warga III adalah penyampaian hasil analisa, bentuk rencana tindak dan lokasi terpilih untuk penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
- 8) Konsep Penanganan Lingkungan dan permukiman kumuh; Konsep penataan lingkungan permukiman, konsep peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Rencana penanganan lingkungan perumahan dan permukiman dinagari muaro sijunjung.

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam Rencana PLP2K, dilakukan melalui:

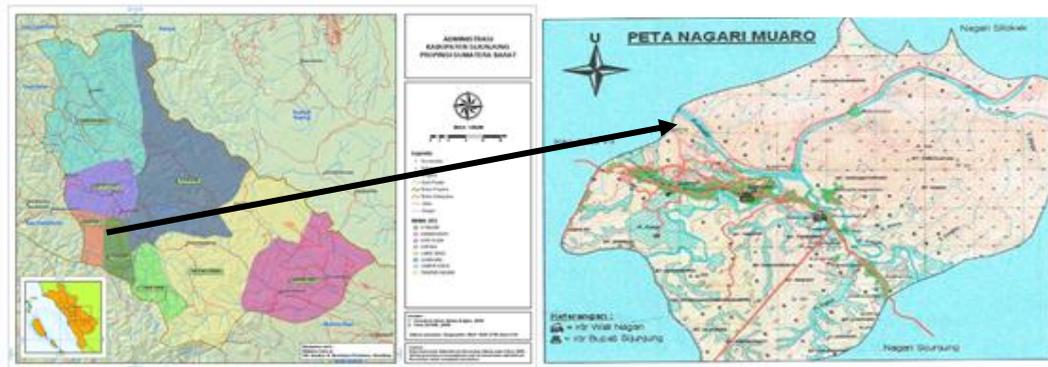
A. Survei Sekunder

Survei sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Data yang diperoleh adalah berupa uraian, data angka, atau peta mengenai keadaan wilayah studi. Selain itu survei sekunder juga didapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Alat yang digunakan adalah daftar kebutuhan data.

B. Survei Primer

Survei primer merupakan metode pencarian data dan informasi yang dilakukan secara langsung mengunjungi lapangan atau melalui responden di lapangan. Metode ini dapat berupa observasi dan hasil kuisisioner.

1. Observasi, merupakan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung guna mendapatkan data yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Alat yang digunakan adalah alat rekam visual dan peta kerja. Peta kerja yang akan digunakan dapat dilihat dalam Gambar 4.



Gambar 4. Peta Kerja Observasi Lapangan

2. Kuesioner

Pengumpulan data primer dari responden. Pada kajian ini responden yang dipilih untuk diwawancarai adalah kepala Jorong dan masyarakat di Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

Analisis Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh

Analisis prioritas penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk memilih lokasi kawasan kumuh yang akan menjadi prioritas penanganan. Dalam analisis ini metode yang akan digunakan adalah **pembobotan atau skoring** terhadap kriteria dan sub kriteria penilaian tingkat kekumuhan sebagaimana terdapat dalam Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dari Kementerian Perumahan Rakyat, Tahun 2012, antara lain:

1. Kondisi Bangunan Gedung, terdiri dari 3 sub kriteria, yaitu:
 - a. Ketidakteraturan Bangunan,
 - b. Tingkat Kepadatan Bangunan,
 - c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis
2. Kondisi Jalan Lingkungan, terdiri dari 2 sub kriteria, yaitu:
 - a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan,
 - b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan,
3. Kondisi Penyediaan Air Minum, terdiri dari 2 sub kriteria, yaitu:
 - a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum,
 - b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum,
4. Kondisi Drainase Lingkungan, terdiri dari 4 sub kriteria, yaitu:
 - a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air,
 - b. Ketidaktersediaan Drainase,
 - c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan,
 - d. Tidak Terpeliharanya Drainase.
 - e. Kualitas Konstruksi Drainase
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah, terdiri dari 3 sub kriteria, yaitu:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis,
 - b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis,
 - c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 3 sub kriteria, yaitu:
 - a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis,
 - b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis,
 - c. Tidak terpilihnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran, terdiri dari 2 sub kriteria, yaitu:

- a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran,
 - b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran
8. Pertimbangan Lain, terdiri dari 3 sub kriteria, yaitu:
- a. Nilai Strategis Lokasi,
 - b. Kependudukan,
 - c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
9. Legalitas Lahan, terdiri dari 3 sub kriteria, yaitu:
- a. Kejelasan Status Lahan,
 - b. Kesesuaian RTR

Selanjutnya kriteria dan sub kriteria tersebut di atas diberi skor atau bobot yaitu: 1, 3, dan 5, dengan ketentuan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pedoman Penentuan Skoring Kekumuhan

| KRITERIA/ SKOR | | 5 | 3 | 1 | |
|----------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | KONDISI BANGUNAN GEDUNG | | | | |
| | 1.A | Ketidakteraturan Bangunan | 76-100% bangunan tidak teratur | 51-75% bangunan tidak teratur | 25-50% bangunan tidak teratur |
| | 1.B | Tingkat Kepadatan Bangunan | 76-100% kepadatan tidak sesuai ketentuan | 51-75% kepadatan tidak sesuai ketentuan | 25-50% kepadatan tidak sesuai ketentuan |
| | 1.C | Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | 76-100% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis | 51-75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis | 25-50% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 2 | KONDISI JALAN LINGKUNGAN | | | | |
| | 2.A | Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | 76-100% area tidak terlayani jaringan jalan lingkungan | 51-75% area tidak terlayani jaringan jalan lingkungan | 25-50% area tidak terlayani jaringan jalan lingkungan |
| | 2.B | Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | 76-100% kualitas permukaan jalan buruk | 51-75% kualitas permukaan jalan buruk | 25-50% kualitas permukaan jalan buruk |
| 3 | KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | |
| | 3.A | Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum | 76-100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 51-75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 25-50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman |
| | 3.B | Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 76-100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal | 51-75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal | 25-50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal |
| 4 | KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | | | | |
| | 4.A | Ketidakkemampuan Mengalirkan Limpasan Air | 76-100% area terdapat genangan >30cm, >2jam >2x setahun | 51-75% area terdapat genangan >30cm, >2jam >2x setahun | 25-50% area terdapat genangan >30cm, >2jam >2x setahun |
| | 4.B | Ketidakterediaan Drainase | 76-100% area tidak tersedia drainase lingkungan | 51-75% area tidak tersedia drainase lingkungan | 25-50% area tidak tersedia drainase lingkungan |
| | 4.C | Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan | 76-100% drainase lingkungan tidak terhubung saluran perkotaan | 51-75% drainase lingkungan tidak terhubung saluran perkotaan | 25-50% drainase lingkungan tidak terhubung saluran perkotaan |
| | 4.D | Tidak Terpeliharanya Drainase | 76-100% drainase tidak terpelihara | 51-75% drainase tidak terpelihara | 25-50% drainase tidak terpelihara |
| | 4.E | Kualitas Konstruksi Drainase | 76-100% konstruksi saluran drainase buruk | 51-75% konstruksi saluran drainase buruk | 25-50% konstruksi saluran drainase buruk |
| 5 | KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | | | | |
| | 5.A | Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 76-100% sistem air limbah tidak memenuhi standar teknis | 51-75% sistem air limbah tidak memenuhi standar teknis | 25-50% sistem air limbah tidak memenuhi standar teknis |
| | 5.B | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 76-100% sarpras air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis | 51-75% sarpras air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis | 25-50% sarpras air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | 5.C | Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah | 76-100% sarpras air limbah tidak terpelihara | 51-75% sarpras air limbah tidak terpelihara | 25-50% sarpras air limbah tidak terpelihara |
| 6 | KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | |
| | 6.A | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 76-100% sarpras persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis | 51-75% sarpras persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis | 25-50% sarpras persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | 6.B | Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis | 76-100% sistem persampahan tidak memenuhi standar teknis | 51-75% sistem persampahan tidak memenuhi standar teknis | 25-50% sistem persampahan tidak memenuhi standar teknis |
| | 6.C | Tidak terpeliharnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 76-100% sarpras tidak terpelihara | 51-75% sarpras tidak terpelihara | 25-50% sarpras tidak terpelihara |
| 7 | KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN | | | | |
| | 7.A | Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 76-100% tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran | 51-75% tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran | 25-50% tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran |
| | 7.B | Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran | 76-100% tidak tersedia sarana proteksi kebakaran | 51-75% tidak tersedia sarana proteksi kebakaran | 25-50% tidak tersedia sarana proteksi kebakaran |
| 8 | PERTIMBANGAN LAIN | | | | |
| | 8.A | Nilai Strategis Lokasi | lokasi strategis pada fungsi kota | lokasi kurang strategis pada fungsi kota | lokasi tidak strategis |
| | 8.B | Kependudukan | kepadatan penduduk >200 jiwa | kepadatan penduduk 151-200 jiwa | kepadatan penduduk <150 jiwa |
| | 8.C | Kondisi Sosial, Ekonomi | ada potensi sosial budaya | | tidak ada potensi sosial budaya |

| KRITERIA/ SKOR | | 5 | 3 | 1 |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| dan Budaya | | dan ekonomi untuk dikembangkan | | dan ekonomi untuk dikembangkan |
| | | (+) | (-) | |
| 9 | LEGALITAS LAHAN | 9.A Kejelasan Status Lahan | status penguasaan lahan tidak jelas | status penguasaan lahan tidak jelas |
| | | 9.B Kesesuaian RTR | kawasan berlokasi sesuai dengan RTR | kawasan berlokasi tidak sesuai dengan RTR |

Sumber: Panduan PLP2K-BK, Kementerian Perumahan Rakyat, Tahun 2012

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Bangunan Gedung

Tabel 5. Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Bangunan Gedung di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Prosentase Ketidakteraturan Bangunan | Tingkat Kepadatan Bangunan | Prosentase Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Pulau Berambai | 12 | 10 | 11,5 |
| 2 | Subarang Ombak | 57 | 9 | 47 |
| 3 | Tengah | 11 | 10 | 12 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 78 | 9 | 20 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 14 | 7 | 20 |
| 6 | Subarang Sukam | 53 | 10 | 34 |
| 7 | Pematang Anjuang | 98 | 7 | 20 |
| 8 | Muaro Gambok | 45 | 5 | 7 |
| 9 | Pematang Saribulan | 67 | 7 | 50 |
| 10 | Batang Salosah | 5 | 5 | 15 |
| Jumlah | | 44 | 7,9 | 24,8 |

Tabel 6. Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Bangunan Gedung di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Skor Ketidakteraturan Bangunan | Skor Tingkat Kepadatan Bangunan | Skor Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | Total Skor |
|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| 1 | Pulau Berambai | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Subarang Ombak | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Tengah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Subarang Sukam | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Pematang Anjuang | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Muaro Gambok | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Pematang Saribulan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Batang Salosah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 1 | 1 | 1 | 3 |

a. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Jalan Lingkungan

Tabel 7. Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Prosentase Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | Prosentase Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan |
|---------------|--------------------|---|--|
| 1 | Pulau Berambai | 5 | 32 |
| 2 | Subarang Ombak | 40 | 93 |
| 3 | Tengah | 55 | 85 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 34 | 67 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 33 | 72 |
| 6 | Subarang Sukam | 54 | 78 |
| 7 | Pematang Anjuang | 52 | 76 |
| 8 | Muaro Gambok | 36 | 63 |
| 9 | Pematang Saribulan | 43 | 67 |
| 10 | Batang Salosah | 7 | 36 |
| Jumlah | | 36 | 67 |

Tabel 8. Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Skor Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | Skor Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | Total Skor |
|---------------|--------------------|---|--|------------|
| 1 | Pulau Berambai | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Subarang Ombak | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Tengah | 3 | 5 | 8 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Subarang Sukam | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Pematang Anjuang | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Muaro Gambok | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Pematang Saribulan | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Batang Salosah | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | | 1 | 3 | 4 |

b. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Penyediaan Air Minum

Tabel 9. Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No | Kawasan Muaro | Prosentase Ketidakterediaan Air Minum (unit rumah tangga) | Prosentase Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (unit rumah tangga) |
|---------------|--------------------|---|---|
| 1 | Pulau Berambai | 3 | 2 |
| 2 | Subarang Ombak | 17 | 33 |
| 3 | Tengah | 1 | 100 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 4 | 3 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 77 | 46 |
| 6 | Subarang Sukam | 100 | 0 |
| 7 | Pematang Anjuang | 11 | 47 |
| 8 | Muaro Gambok | 34 | 7 |
| 9 | Pematang Saribulan | 5 | 26 |
| 10 | Batang Salosah | 6 | 10 |
| Jumlah | | 26 | 27 |

Tabel 10. Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Skor Ketidakterediaan Air Minum | Skor Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | Total Skor |
|---------------|--------------------|---------------------------------|---|------------|
| 1 | Pulau Berambai | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Subarang Ombak | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Tengah | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Subarang Sukam | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Pematang Anjuang | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Muaro Gambok | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Pematang Saribulan | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Batang Salosah | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | | 1 | 1 | 2 |

Sumber: Hasil Survey, 2018

c. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Drainase Lingkungan

Tabel 11. Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Drainase Lingkungan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No | Kawasan Muaro | Prosentase Kondisi Drainase Permukiman Yang Berfungsi Baik | Prosentase Kondisi Drainase Permukiman Berkualitas Minimum Memadai |
|---------------|--------------------|--|--|
| 1 | Pulau Berambai | 26 | 89 |
| 2 | Subarang Ombak | 26 | 100 |
| 3 | Tengah | 69 | 99 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 7 | 99 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 19 | 100 |
| 6 | Subarang Sukam | 16 | 100 |
| 7 | Pematang Anjuang | 4 | 100 |
| 8 | Muaro Gambok | 71 | 99 |
| 9 | Pematang Saribulan | 12 | 100 |
| 10 | Batang Salosah | 35 | 100 |
| jumlah | | 18 | 99 |

Sumber: Hasil Survey, 2018

Tabel 12. Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Drainase Lingkungan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No | Kawasan Muaro | Skor Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | Skor Ketidaktertidakan Drainase | Skoer Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan | Skor Tidak Terpeliharanya Drainase | Skor Kualitas Konstruksi Drainase | Total Skor |
|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Pulau Berambai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Subarang Ombak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Subarang Sukam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Pematang Anjuang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Muaro Gambok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Pematang Saribulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Batang Salosah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Jumlah | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Sumber: Hasil Survey, 2018

d. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Air Limbah

Tabel 13. Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Air Limbah di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Prosentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | Prosentase Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Prosentase Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah |
|---------------|--------------------|--|---|---|
| 1 | Pulau Berambai | 2 | 13 | 0 |
| 2 | Subarang Ombak | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Tengah | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 23 | 24 | 0 |
| 6 | Subarang Sukam | 62 | 62 | 0 |
| 7 | Pematang Anjuang | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Muaro Gambok | 2 | 24 | 0 |
| 9 | Pematang Saribulan | 19 | 8 | 0 |
| 10 | Batang Salosah | 4 | 6 | 0 |
| Jumlah | | 13 | 16 | 0 |

Sumber: Hasil Survey, 2018

Tabel 14. Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Air Limbah di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Luas (Ha) | Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------------|---|--|--|----------|
| 1 | Pulau Berambai | 59,13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Subarang Ombak | 170,02 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tengah | 39,38 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 394,83 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 97,36 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Subarang Sukam | 73,39 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Pematang Anjuang | 523,57 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Muaro Gambok | 155,98 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Pematang Saribulan | 468,42 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Batang Salosah | 154,99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 2.137,07 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Sumber: Hasil Survey, 2018

e. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Persampahan

Tabel 15. Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Persampahan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Prosentase Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Prosentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis | Prosentase Tidak terpilihnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan |
|---------------|--------------------|--|--|---|
| 1 | Pulau Berambai | 38 | 38 | 38 |
| 2 | Subarang Ombak | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tengah | 81 | 81 | 81 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 56 | 56 | 56 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 92 | 92 | 92 |
| 6 | Subarang Sukam | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Pematang Anjuang | 98 | 98 | 98 |
| 8 | Muaro Gambok | 61 | 61 | 61 |
| 9 | Pematang Saribulan | 97 | 97 | 97 |
| 10 | Batang Salosah | 26 | 26 | 26 |
| Jumlah | | 65 | 65 | 65 |

Sumber : Hasil Survey, 2018

Tabel 16. Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Persampahan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No | Kawasan Muaro | Skor Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Skor Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis | Skor Tidak terpilihnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Total Skor |
|---------------|--------------------|--|--|---|------------|
| 1 | Pulau Berambai | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Subarang Ombak | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tengah | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | Subarang Sukam | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | Pematang Anjuang | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 8 | Muaro Gambok | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Pematang Saribulan | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 10 | Batang Salosah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 3 | 3 | 3 | 9 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

f. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Proteksi Kebakaran

Tabel 17. Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Proteksi Kebakaran di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Skor Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | Skor Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran | Total Skor |
|---------------|--------------------|--|---|------------|
| 1 | Pulau Berambai | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Subarang Ombak | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Tengah | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Subarang Sukam | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Pematang Anjuang | 5 | 5 | 10 |
| 8 | Muaro Gambok | 5 | 5 | 10 |
| 9 | Pematang Saribulan | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Batang Salosah | 5 | 5 | 10 |
| Jumlah | | 4,6 | 4,6 | 9,2 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tabel 17. Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Proteksi Kebakaran di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Prosentase Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | Prosentase Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran |
|---------------|--------------------|--|---|
| 1 | Pulau Berambai | 100 | 100 |
| 2 | Subarang Ombak | 100 | 100 |
| 3 | Tengah | 100 | 100 |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 100 | 100 |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 100 | 100 |
| 6 | Subarang Sukam | 100 | 100 |
| 7 | Pematang Anjuang | 100 | 100 |
| 8 | Muaro Gambok | 100 | 100 |
| 9 | Pematang Saribulan | 100 | 100 |
| 10 | Batang Salosah | 100 | 100 |
| Jumlah | | 100 | 100 |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Kesimpulan Penilaian Kekumuhan

Berdasarkan kriteria dan sub kriteria di atas maka penilaian tingkat kekumuhan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kawasan yang memenuhi kriteria sangat kumuh dengan total skor antara 46-56, meliputi: Jorong Tengah, Jorong Hilia Gaguak Dadok, Jorong Subarang Sukam dan Jorong Pematang Anjuang.
2. Kawasan yang memenuhi kriteria kumuh dengan total skor antara 35-45, meliputi: Jorong Hilia Pasa Jumat, Jorong Muara Gambok, Jorong dan Pematang Saribulan.
3. Kawasan yang memenuhi kriteria tidak kumuh dengan total skor antara 1-34, meliputi: Jorong Pulau Berambai, Jorong Subarang Ombak, dan Jorong Batang Salosah.

Tabel 18. Kesimpulan Penilaian Tingkat Kekumuhan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

| No. | Kawasan Muaro | Skor Kondisi Bangunan Gedung | Skor Kondisi Jalan Lingkungan | Skor Kondisi Penyediaan Air Minum | Skor Kondisi Drainase Lingkungan | Skor Kondisi Pengelolaan Air Limbah | Skor Kondisi Pengelolaan Persampahan | Skor Kondisi Proteksi Kebakaran | Skor Total | Tingkat Kekumuhan |
|-----|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Pulau Berambai | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 28 | Tidak Kumuh |
| 2 | Subarang Ombak | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 26 | Tidak Kumuh |
| 3 | Tengah | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | 50 | Sangat Kumuh |
| 4 | Hilia Pasa Jumat | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 40 | Kumuh |
| 5 | Hilia Guguak Dadok | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 15 | 10 | 48 | Sangat Kumuh |
| 6 | Subarang Sukam | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 15 | 10 | 56 | Sangat Kumuh |
| 7 | Pematang Anjuang | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 50 | Sangat Kumuh |
| 8 | Muaro Gambok | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 36 | Kumuh |
| 9 | Pematang Saribulan | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 10 | 44 | Kumuh |
| 10 | Batang Salosah | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 28 | Tidak Kumuh |
| | Jumlah | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9,2 | 35 | Kumuh |

Sumber: Hasil Analisis, 2018

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan Prioritas Penanganan adalah:

1. Jorong Subarang Sukam merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya karena merupakan kawasan yang memiliki kompleksitas permasalahan kawasan mencirikan kawasan kumuh,
2. Jorong Tengah menjadi Prioritas ke 2 dalam Penanganan
3. Jorong Pematang Anjuang, menjadi Prioritas ke 3.

Prioritas Penanganan jatuh pada Jorong Subarang Sukam

Tabel 19.

| Permasalahan Yang ada Pada Prioritas pertama | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--------|-------------------------|
| No. | Kawasan Muaro | Luas (Ha) | Kondisi Bangunan Gedung | Kondisi Jalan Lingkungan | Kondisi Penyediaan Air Minum | Kondisi Drainase Lingkungan | Kondisi Pengelolaan Air Limbah | Kondisi Pengelolaan Persampahan | Kondisi Proteksi Kebakaran | Jumlah | Prioritas Lokasi Survey |
| 1 | Subarang Sukam | 73,39 | 0 | Jalan permukiman tidak mempunyai drainase ± 2000 m, Jalan masih tanah atau rusak | Tidak memiliki sumber air bersih dan saluran air bersih | Tidak memiliki drainase | Saluran buangan air limbah tidak teratur, Belum mempunyai WC | Tidak memiliki tempat sampah | Tidak memiliki Proteksi Kebakaran | 6 | Lokasi Survey-1 |
| Usulan Pemecahan Masalah Pada Prioritas Pertama | | | | | | | | | | | |
| No. | Kawasan Muaro | Luas (Ha) | Kondisi Bangunan Gedung | Kondisi Jalan Lingkungan | Kondisi Penyediaan Air Minum | Kondisi Drainase Lingkungan | Kondisi Pengelolaan Air Limbah | Kondisi Pengelolaan Persampahan | Kondisi Proteksi Kebakaran | Jumlah | Prioritas Lokasi Survey |
| 1 | Subarang Sukam | 73,39 | 0 | Pembuatan dan perbaikan jalan lingkar sepanjang 2 km, Penambahan lampu jalan di Jembatan dan Hilir | Pembuatan saluran air bersih | Pembuatan Drainase di sisi kiri dan kanan jalan lingkar sepanjang 2 km, Pembuatan saluran di 7 titik | Pembuatan WC Umum di Jalan Simping 3 Jorong | Pembuatan tempat pembuangan sampah di Calau | Pemasangan Hidran untuk Proteksi Kebakaran | 6 | Lokasi Survey-1 |

Dari Hasil CAP di Jorong Subarang Sukam Konsep Penanganan di fokuskan kepada :

1. Pembuatan Jalan dan Perbaikan Jalan sepanjang 2 Km dan Penambahan Lampu Jalan, Perkerasan jalan Jalan Lingkung dengan rabat beton
2. Plat Duiker /Gorong gorong
3. Pembuatan Drainase kanan dan kiri jalan Lingkungan.
4. Pembuatan WC Umum /MCK Komunal
5. Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara
6. Pembuatan Sumber Air Minum atau Pemasangan saluran PDAM
7. Pemasangan Hidran untuk proteksi kebakaran.

Contoh Penanganan terhadap perbaikan Jalan Lingkungan



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada:

- Kemenristek Dikti yang telah membiayai penelitian ini dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)
- Kepada Rektor Universitas Ekasakti dan Pimpinan LPPM UNES yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan ini.
- Kepada Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan UNES telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan ini.
- Kepada Wali Nagari Muaro Sijunjung beserta perangkat nya, kepala jorong pada lokasi penelitian, masyarakat di nagari muaro serta tim survey Penelitian yang telah banyak membantu dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat, 2012, *Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman berbasis kawasan*, Jakarta.

Eko Budiharjo, 2009. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, Jakarta

Eko Budiharjo, 2009. *Kota Berkelanjutan*, Jakarta

Eko Budiharjo, 2009. *Wawasan Lingkungan Dalam Pembangunan Perkotaan*, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten,

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat,

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032,

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tahun tentang Pengelolaan Persampahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

=====